

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Jepara

Halaman 13

## 7 Desa Belum Bisa Cairkan ADD

**JEPARA-** Memasuki pertengahan tahun 2017, masih ada tujuh desa yang belum mampu mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2017. Persoalan ini mengemuka dalam Rakernis (Rapat Kerja Tehnis) DD dan ADD untuk desa Se-Kabupaten Jepara, di Pendapa Kabupaten, Kamis (10/8).

Desa-desa tersebut diketahui belum bisa menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), sebagai salah satu syarat untuk bisa mencairkan.

Menurut Kabid Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara, Budi Prisolistyono, hal ini

terjadi karena masih lemahnya perencanaan di desa. Tujuh desa yang masih belum bisa mencairkan dana DD dan ADD tersebut diantaranya adalah, Desa Moro-rejo, Bandungharjo, Tanggultlare, Kedung Malang dan Surodadi.

Padahal desa-desa yang lain sudah berhasil mencairkan pada tahap pertama yang sudah direncanakan.

"Jika diprosesntasikan, sekitar 70 persen desa di Jepara sebenarnya sudah menguasai tata kelola keuangan untuk DD maupun ADD. Sedang-

kan sisanya 30 persen memang diakui masih perlu mendapatkan pendampingan lebih.

Dalam kasus ini ada kelemahan dalam hal perencanaan," ujar Budi Pristiyono, Kamis (10/8).

Asisten III Setda Jepara, M Fadkurrozi meminta kepada seluruh camat, kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), pendamping desa, OPD terkait untuk ber-sinergi, termasuk mengalokasikan wak tu khusus untuk mengatasi masalah ini. Pihaknya menginstruksikan agar

mereka segera turun langsung ke desa-desa tersebut untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembimbingan.

### ■ **Serius**

Sedangkan kepada para Petinggi Desa, Fatkhurrozi meminta agar lebih serius dalam mengurus hal ini. Selama ini Pemkab Jepara juga sudah melakukan pendampingan secara intens. Jangan sampai hal ini pada akhirnya membuat proses pembangunan menjadi terganggu.

Sebab saat ini pembangunan desa sedang menjadi prioritas pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

" Saya minta agar ada langkah proaktif dalam hal ini. Gambarannya, tiap kecamatan segera menugaskan kasie PMD bersama PD untuk mengalokasikan waktu satu hari satu desa untuk memberikan bimbingan langsung kepada pelaku desa yaitu sekdes dan bendahara desa terkait instrumen APBDes" ujarnya. ■

dis-Tj